

pengawasan. Hambatan kultural lainnya yaitu dalam proses hukum masih banyak aparat penegak hukum yang tidak memiliki sertifikasi untuk melakukan proses hukum terhadap anak.

B. Saran

1. Keindependensian KPAI harus ditegaskan kembali, dapat dimulai dari Kepala Sekretariat yang diangkat menjadi eselon 1, sehingga dalam pengajuan anggaran KPAI tidak lagi dititipkan kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
2. Tugas sosialisasi KPAI untuk dapat diatur kembali di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, sehingga dalam upaya penyelenggaraan perlindungan anak yang dilakukan oleh KPAI menjadi lebih efektif.
3. Komisi Perlindungan Anak Indonesia dapat memperbaiki data berdasarkan tugasnya, agar dapat mempermudah dalam memperoleh informasi tentang pelaksanaan tugas KPAI.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Zainuddin, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)
- Asshiddiqie, Jimly, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006)
- Asshiddique, Jimly, Perkembangan dan Konsolidasi Negara Pasca Reformasi, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010)
- Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015)
- Badawi, Enny Rosyidah, Komisi Perlindungan Anak Indonesia Sebagai Pengawas Penyelenggaraan Perlindungan Anak Di Indonesia, (Jakarta: Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2010)
- Gosita, Arif, Masalah Perlindungan Anak, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1998)
- Gultom, Maidin, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, (Bandung: Refika Aditama, 2006)
- Johan, Teuku Saiful Bahri, Hukum Tata Negara Indonesia dan Hukum Administrasi Negara Dalam Tataran Reformasi Ketatanegaraan Indonesia, (Yogyakarta: Deepublish, 2012)
- Jurdi, Fajlurrahman, Hukum Tata Negara Indonesia, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019)
- Kelsen, Hans, Teori Umum Tentang Hukum dan Negara, diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien, (Bandung: Penerbit Nusamedia, 2006)
- Khelda, Ayunita dan Abd. Rais Asman, Hukum Tata Negara Indonesia, (Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media, 2016)
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Laporan Kinerja KPAI Tahun 2017, (Jakarta: KPAI, 2017)
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Laporan Kinerja KPAI Tahun 2019, (Jakarta: KPAI, 2019)

- Nugraha, Safri, Hukum Administrasi Negara, (Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007)
- Poerwadarminta, W.J.S., Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Balai Pustaka: Amirko, 1984)
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001)
- Soemitro, Ronny Hanitjo, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982)
- Soimin dan Mashuriyanto, Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, (Yogyakarta: UII Press, 2013)
- Suteki dan Galang Taufani, Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik), (Depok: Rajawali Pers, 2018)
- Tutik, Titik Triwulan, Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945, (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2010)

Jurnal

- Alamsyah, Bunyamin dan Uu Nurul Huda, “Politik Hukum Pelembagaan Komisi-Komisi Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”, Jurnal Hukum dan Peradilan Vol. 2 No. 1, (Maret 2013):94. Diakses pada 3 November 2020. <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiwjo61rObsAhXHANIKHRfLDwgQFjAEegQICxAC&url=http%3A%2F%2Fjurnalhukumdanperadilan.org%2Findex.php%2Fjurnalhukumperadilan%2Farticle%2Fdownload%2F126%2F137&usg=AOvVaw13fSM98qabJ3uQuCMYPmcp>.
- Diamantina, Amalia. “Membangun Sistem Hukum Kewarganegaraan Republik Indonesia Yang Berperspektif Perlindungan Anak”. Jurnal Masalah – Masalah Hukum Jilid. 42 No. 3, (Juli 2013):332. Diakses pada 2 November 2020. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5823/9927>
- Djusfi, Apri Rotin. “Kedudukan Dan Fungsi Komisi Perlindungan Anak Indonesia Dalam Melindungi Hak-Hak Anak”. Jurnal Public Policy, (Juni 2019):153. Diakses pada 4 Juli 2020. https://www.researchgate.net/publication/334961822_KEDUDUKAN_DAN_FUNGSI_KOMISI_PERLINDUNGAN_ANAK_INDONESIA_DALAM_MELINDUNGI_HAK-HAK_ANAK

- Fitriani, Rini. “Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak”. Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol. 11 No.1,(Juli – Desember, 2016):253. Diakses pada 4 Juli 2020.<https://media.neliti.com/media/publications/240378-peranan-penyelenggara-perlindungan-anak-ff389e41.pdf>
- Hamid, Solihin Ichas. “Pemenuhan Dan Perlindungan Hak Anak Dalam Menyongsong Indonesia Emas 2045”, Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini, Vol 6 No 1, (2015): 19. Diakses pada 19 Oktober 2020.<https://ejournal.Upi.Edu/Index.Php/Cakrawaladini/Article/View/10513>.
- Kurniawan, Teguh. “Peran Parlemen Dalam Perlindungan Anak” , Jurnal Aspirasi Vol 6. No. 1, (Juni 2015):39. Diakses pada 6 November 2020.<https://jurnal.dpr.go.id/index.php/aspirasi/article/view/467>.
- Melati, Dwi Putri. “Implementasi Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak Oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia”. Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Vol. 9 No.1, (Januari – Maret, 2015): 35. Diakses pada 4 Juli 2020. [Jurnal.fh.unila.ac.id](http://jurnal.fh.unila.ac.id)
- Mukhlis. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Kejahatan Pelecehan Seksual Di Pekanbaru Tahun 2014”. Jurnal Masalah – Masalah Hukum Jilid 45 No. 4,(Oktober 2016): 276. Diakses pada 16 November 2020.<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13736/10450>.
- Rizki, Devi Ayu dkk.“Pemenuhan Hak Partisipasi Anak Melalui Forum Anak Dalam Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak Di Kota Bandung”. SHARE Social Work Journal, Vol. 5, No. 1, (2015):11. Diakses pada 8 Juni 2020, <http://jurnal.unpad.ac.id/share/article/view/13085/5967>
- Sugianto. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Dalam Prespektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus Pada Yayasan Madinatunajjah Kota Cirebon)”, Jurnal Syariah dan Hukum Vol 5 No 2,(Desember 2013): 151. Diakses pada 4 Juli 2020.<https://media.neliti.com/media/publications/23661-ID-perlindungan-hukum-terhadap-anak-jalanan-dalam-prespektif-hukum-positif-dan-huku.pdf>

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang –
Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang–Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Internet :

Profil Komisi Perlindungan Anak Indonesia, <https://www.kpai.go.id/profil>,
diakses pada 1 Oktober 2020